

Pengantar Diskusi Kinerja APBD Sulsel

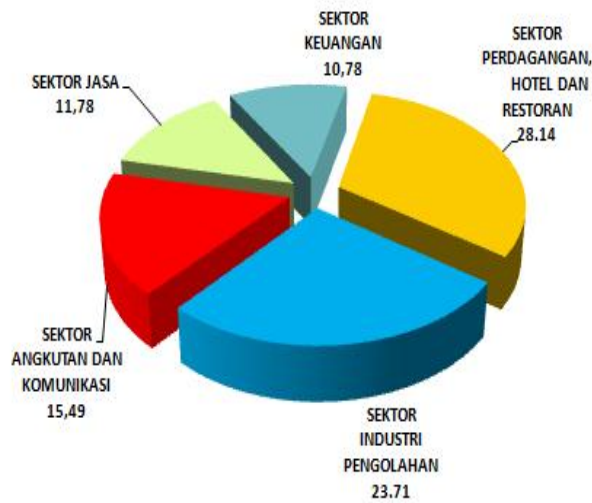
Oleh

Syamsuddin Alimsyah
Koor. KOPEL Indonesia

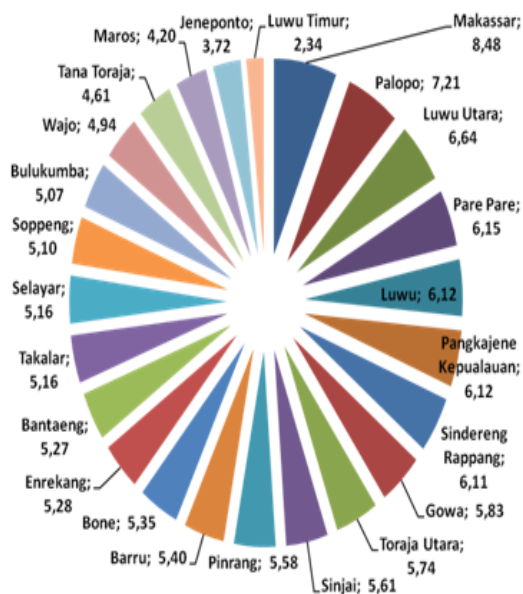
Latar Belakang

- Provinsi Sulsel sebagai pintu gerbang Indonesia Timur ??
- Dari segi kesehatan keuangan suatu daerah ?? → apakah pertumbuhan ekonomi 9 persen karena APBD ? Atau dominan faktor lain.
- Atau ... Sokongan dari daerah yang secara ekonomi sangat kuat ??
- Sulsel sesungguhnya selalu tidak taat klender anggaran.
- Pencapaian MDGs 2015

STRUKTUR PEREKONOMIAN KOTA MAKASSAR

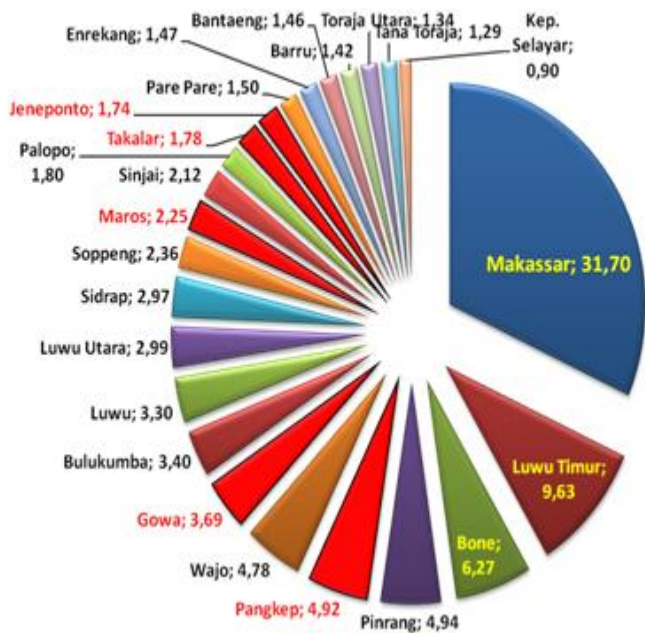


PERTUMBUHAN EKONOMI DALAM 24 KAB. / KOTA SE SULSEL. TAHUN 2005 - 2010



NO	KABUPATEN / KOTA	GROWTH
01	Makassar	8,48
02	Palopo	7,21
03	Luwu Utara	6,64
04	Pare Pare	6,15
05	Luwu	6,12
06	Pangkajene Kepulauan	6,12
07	Sindereng Rappang	6,11
08	Gowa	5,83
09	Toraja Utara	5,74
10	Sinjai	5,61
11	Pinrang	5,58
12	Barru	5,40
13	Bone	5,35
14	Enrekang	5,28
15	Bantaeng	5,27
16	Takalar	5,16
17	Selayar	5,16
18	Soppeng	5,10
19	Bulukumba	5,07
20	Wajo	4,94
21	Tana Toraja	4,61
22	Maros	4,20

SHARING PDRB KOTA MAKASSAR TERHADAP SULSEL 2010 (%)



Sebagai Gerbang Timur



- Gubernur "Sayang" sangat "Ambisius" positif ingin menjadikan Sulsel setidaknya sebagai daerah yang mampu diperhitungkan di tingkat nasional
- 10 terbaik dalam pemenuhan hak dasar

VISI GUBERNUR SULAWESI SELATAN

A. Visi

Visi Pembangunan Sulawesi Selatan merupakan gambaran kesuksesan yang ingin dicapai dalam kurun waktu 5 tahun ke depan yang disusun dengan memperhatikan Visi RPJPD 2008-2028 Sulawesi Selatan, substansi RPJM Nasional, dinamika lingkungan strategis, aspirasi masyarakat dan pemerintah Sulawesi Selatan, serta visi misi Gubernur / Wakil Gubernur. Untuk itu Visi Pembangunan Sulawesi Selatan untuk 5 tahun pertama RPJMD 2008-2013 adalah :

“Sulawesi Selatan Sebagai Provinsi Sepuluh Terbaik Dalam Pemenuhan Hak Dasar”

Yang dimaksud **Sepuluh terbaik** indikatornya adalah dengan menggunakan capaian IPM (Indeks Pembangunan Manusia) dibandingkan dengan IPM Provinsi lainnya atau indikator yang lebih realistis adalah dengan menggunakan laju peningkatan IPM itu sendiri. Mengingat posisi Sulsel dalam peringkat IPM Nasional sangat jauh dari 10 besar. Indikator IPM lainnya adalah laju peningkatan kapasitas fiskal daerah sebagai salah satu indikator kemampuan pemerintah dalam penyediaan pelayanan kepada masyarakat.

Yang dimaksud **Pemenuhan Hak Dasar** adalah pemberian fasilitas kepada masyarakat berdasar kewenangan yang dimiliki pemerintah provinsi berupa pelayanan pembangunan dan regulasi.

DIMENSI DAN INDIKATOR IPM

Dimensi	Indikator
Kesehatan	Angka Harapan Hidup
Pendidikan	Angka Melek Huruf
	Rata-Rata Lama Sekolah
Daya Beli	Pengeluaran per kapita sebulan
Dimensi dan Indikator	

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) mengukur tiga dimensi pokok pembangunan manusia yang dinilai mencerminkan status kemampuan dasar penduduk, yaitu :

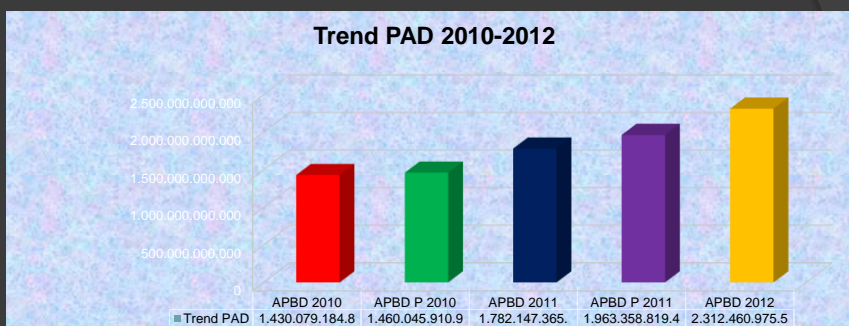
1. Umur panjang dan sehat yang mengukur peluang hidup
2. Berpengetahuan dan berketerampilan
3. Akses terhadap sumber daya yang dibutuhkan untuk mencapai standar hidup layak

PENDAPATAN DAERAH



Pendapatan daerah Sulawesi Selatan dari tahun 2010-2012 mengalami peningkatan rata-rata 47 %

PENDAPATAN ASLI DAERAH

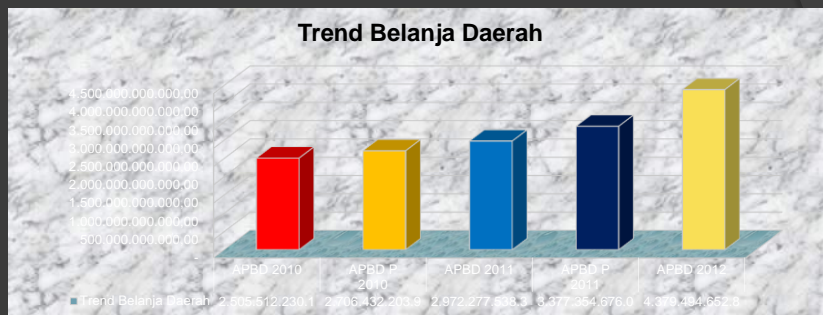


Pendapatan Asli daerah Sulawesi Selatan dari tahun 2010-2012 mengalami peningkatan rata-rata 46 %

DANA TRANSFERAN



BELANJA DAERAH 2010-2012



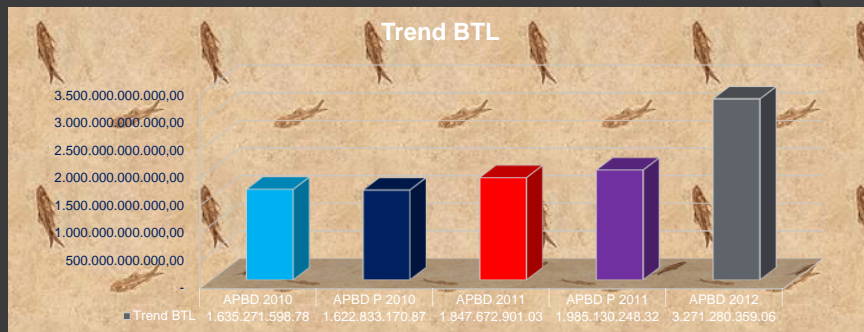
Dana Perimbangan Sulawesi Selatan dari tahun 2010-2012 mengalami peningkatan rata-rata 55 %

Bagaimana dgn IPM ?

Tabel Indeks Pembangunan Manusia Propinsi dan Nasional,
2007- 2010

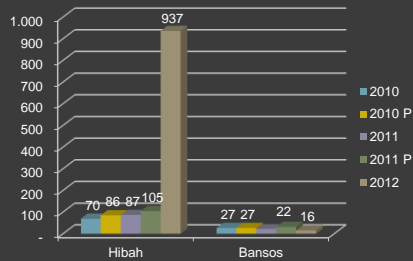
Provinsi	2007		2008		2009		2010	
36. Banten	69.29	23	69.70	23	70.06	23	70.48	23
51. Bali	70.53	16	70.98	16	71.52	16	72.28	16
52. Nusa Tenggara Barat	63.71	32	64.12	32	64.66	32	65.20	32
53. Nusa Tenggara Timur	65.36	31	66.15	31	66.60	31	67.26	31
61. Kalimantan Barat	67.53	29	68.17	29	68.79	28	69.15	28
63. Kalimantan Selatan	68.01	26	68.72	26	69.30	26	69.92	26
71. Sulawesi Utara	74.68	2	75.16	2	75.68	2	76.09	2
72. Sulawesi Tengah	69.34	22	70.09	22	70.70	22	71.14	22
73. Sulawesi Selatan	69.62	21	70.22	21	70.94	20	71.62	19
74. Sulawesi Tenggara	68.32	25	69.00	25	69.52	25	70.00	25
75. Gorontalo	68.83	24	69.29	24	69.79	24	70.28	24
76. Sulawesi Barat	67.72	28	68.55	27	69.18	27	69.64	27
81. Maluku	69.96	18	70.38	19	70.96	19	71.42	20
82. Maluku Utara	67.82	27	68.18	28	68.63	29	69.03	30
91. Irian Jaya Barat	67.28	30	67.95	30	68.58	30	69.15	29
94. Papua	63.41	33	64.00	33	64.53	33	64.94	33

BELANJA TIDAK LANGSUNG 2010-2012



Belanja Tidak Langsung Sulawesi Selatan dari tahun 2010-2012 mengalami peningkatan rata-rata 62 %

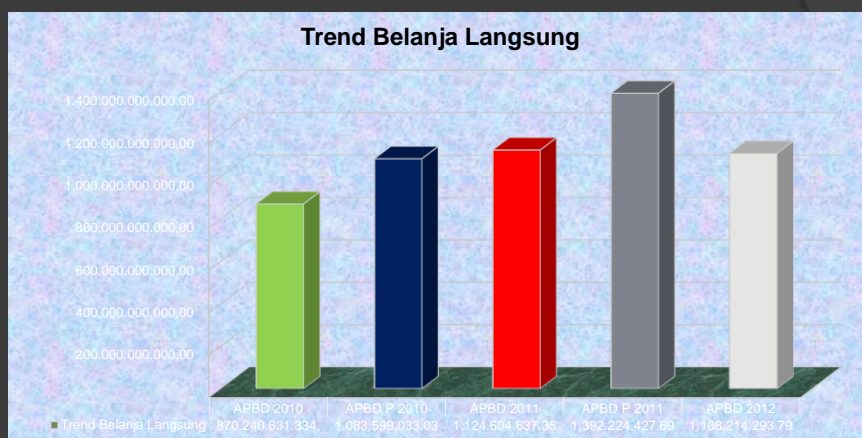
Belanja Hibah dan Bansos



Belanja hibah dan Bansos menyedot 41,24% dari PAD atau 21 % dari total belanja

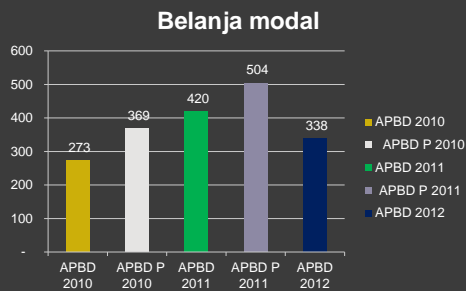


BELANJA LANGSUNG 2010-2012



Menarik belanja tidak langsung 2012 naik, tapi belanja langsung berkurang turun. Terutama di belanja modal

Belanja Modal

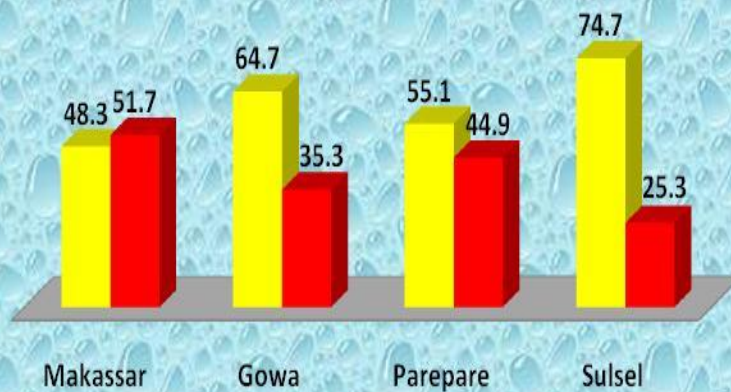


Belanja modal yang menyentuh langsung pada masyarakat hanya 338 miliar atau 7,7 % dari Total Belanja



PROPORSI BELANJA APBD 2012

■ Belanja Tidak Langsung ■ Belanja Langsung





Contoh Alokasi Anggaran

PROGRAM DAN KEGIATAN TA. 2012 PADA BIRO PEMERINTAHAN UMUM SETDA PROV. SULSEL					
NO	PRGORAM	JUMLAH			
1	2	3			
1	Pelayanan Administrasi Perkantoran	Rp 605.642.900			
2	Penguatan Kelembagaan Pemerintah Daerah	Rp 958.841.000			
3	Penyelesaian Konflik-Konflik Pertanahan	Rp 185.547.800			
4	Penyelesaian Masalah Perbatasan antar Daerah/ Provinsi	Rp 473.142.800			
5	Penataan Administrasi Kependudukan	Rp 502.064.500			
6	Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa	Rp 2.024.761.000			
JUMLAH		Rp 4.750.000.000			
NO	KEGIATAN	BELANJA PEGAWAI	BELANJA BARANG DAN JASA	BELANJA MODAL	JUMLAH (Rp)
1	2	3	4	5	6
1.1	Pengelolaan dan Penatausahaan Biro Pemerintahan Umum	Rp 235.700.000	Rp 346.942.900	Rp 23.000.000	Rp 605.642.900
2.1	Pembinaan Pelaksanaan Tugas Dekonsentrasi	Rp 86.628.000	Rp 119.772.000	Rp -	Rp 206.400.000
2.2	Fasilitasi dan Koordinasi Tugas Pembantuan	Rp 85.200.000	Rp 101.800.000	Rp -	Rp 187.000.000
2.3	Koordinasi dan Pembinaan Kecamatan	Rp 126.175.000	Rp 142.866.000	Rp -	Rp 269.041.000
2.4	Fasilitasi dan Koordinasi Pelaksanaan Tugas Pemerintahan Umum	Rp 171.000.000	Rp 125.400.000	Rp -	Rp 296.400.000
3.1	Fasilitasi Penyelesaian Konflik-konflik Pertanahan	Rp 73.440.000	Rp 112.107.800	Rp -	Rp 185.547.800
4.1	Koordinasi Penyelesaian Masalah Perbatasan antar Daerah/ Provinsi dan Toponimi	Rp 246.398.000	Rp 226.744.800	Rp -	Rp 473.142.800
5.1	Pengoperasian Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIK) di Prov. Sulsel	Rp 88.070.000	Rp 198.994.500	Rp -	Rp 287.064.500
5.2	Sosialisasi Kebijakan Bidang Pencatatan Sipil	Rp 85.806.000	Rp 129.194.000	Rp -	Rp 215.000.000
6.1	Bimbingan Teknis Pengelolaan Keuangan Desa	Rp 59.500.000	Rp 225.460.000	Rp 22.270.000	Rp 307.230.000
6.2	Pembinaan Kelembagaan Desa	Rp 57.900.000	Rp 200.211.000	Rp -	Rp 258.111.000
6.3	Inventarisasi Data Desa/ Lembang dan Kelurahan	Rp 64.800.000	Rp 151.700.000	Rp -	Rp 216.500.000
6.4	Pembinaan dan Fasilitasi Kerjasama Desa	Rp 60.350.000	Rp 337.350.000	Rp -	Rp 397.700.000
6.5	Peningkatan SDM Aparatur Desa	Rp 108.250.000	Rp 736.970.000	Rp -	Rp 845.220.000
JUMLAH		Rp 1.549.217.000	Rp 3.155.513.000	Rp 45.270.000	Rp 4.750.000.000

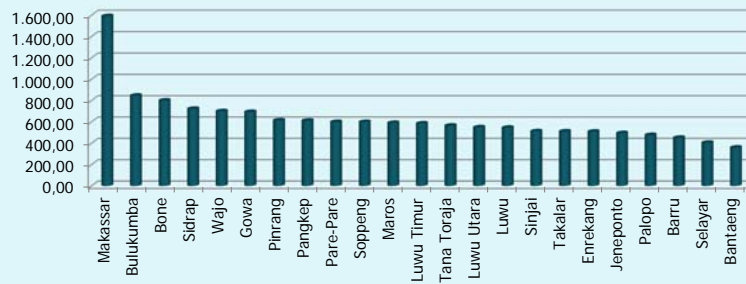


Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa, Tahun 2012 sebesar Rp. 4.750.000.000,- (Empat Milyar Tujuh Ratus Lima Puluh Juta Rupiah), dengan rincian anggaran belanja langsung sebagai berikut :

- Belanja Pegawai	:Rp. 1.549.217.000,-
- Belanja Barang dan Jasa	:Rp. 3.155.513.000,-
- Belanja Modal	:Rp. 45.270.000,-
Total	:Rp. 4.750.000.000,-

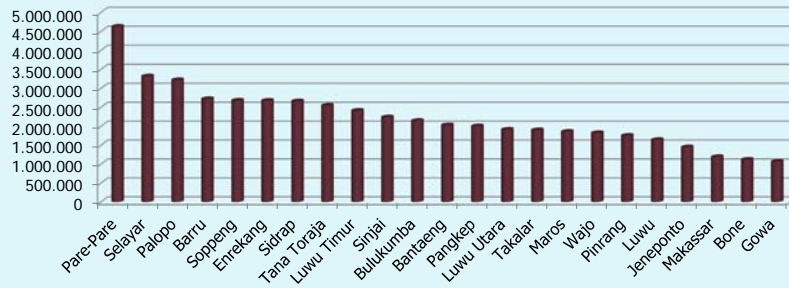


Total Belanja Daerah Menurut Kab./Kota, 2011



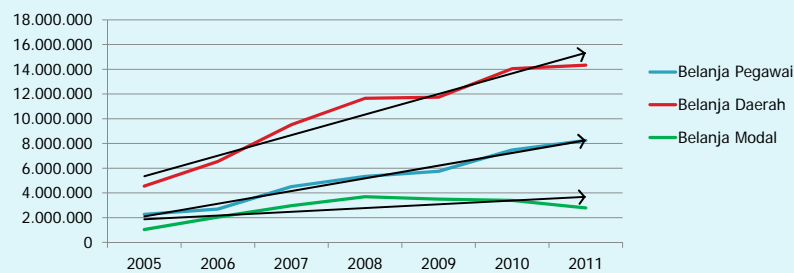
- Kabupaten/kota dengan Belanja Daerah terendah (di bawah Rp 500 miliar) adalah Bantaeng, Selayar, Barru, Palopo, dan Jeneponto.

Total Belanja Daerah Per Kapita Menurut Kab./Kota, 2011



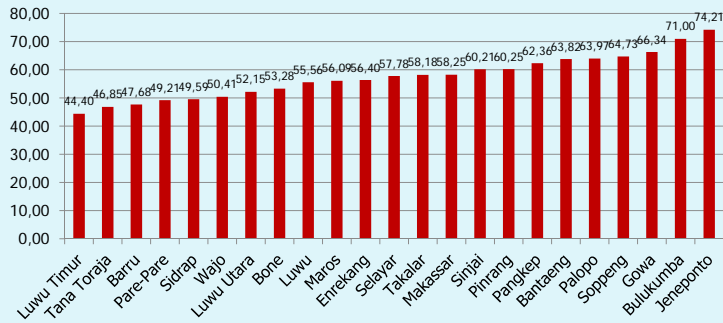
- ☑ Kabupaten/kota dengan Belanja Daerah Per Kapita terendah adalah Kabupaten Gowa, Bone, Makassar, Jenepono, dan Luwu.
- ☑ Belanja Daerah Per Kapita Kota Pare-Pare (tertinggi) hampir lima kali lipat dari Kabupaten Gowa (terendah).

Peningkatan Belanja Pegawai dan Total Belanja Daerah Kab./Kota, 2005-2011



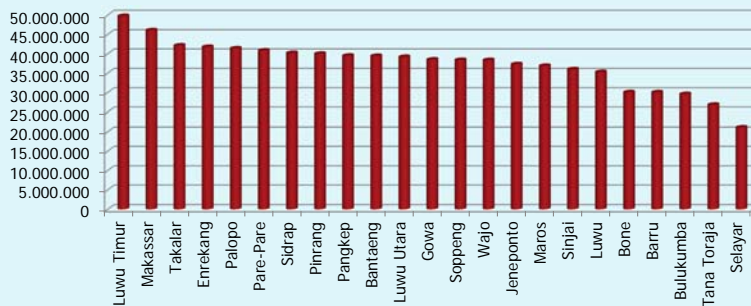
- ☑ Selama periode 2005-2011, belanja pegawai kabupaten/kota meningkat hampir empat kali lipat, belanja modal meningkat hanya dua setengah kali lipat, dan total belanja daerah meningkat sekitar tiga kali lipat.
- ☑ Peningkatan belanja pegawai yang lebih cepat dibanding total belanja daerah menyebabkan proporsi belanja pegawai meningkat terhadap total belanja daerah.

Proporsi Belanja Pegawai Terhadap Total Belanja Daerah Menurut Kab./Kota, 2011



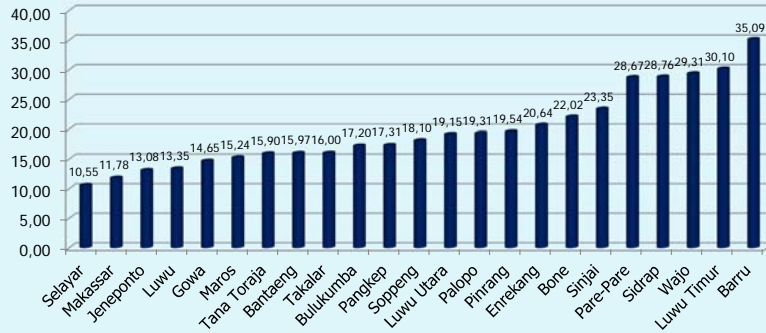
- ☑ Tahun 2011, secara rata-rata, proporsi belanja pegawai terhadap total belanja daerah kabupaten/kota mencapai 57,55%, meningkat dibandingkan tahun 2005 (49,83%),
- ☑ Kabupaten Jeneponto tertinggi, Kabupaten Luwu Timur terendah.

Belanja Pegawai Per PNS Menurut Kab./Kota, 2009



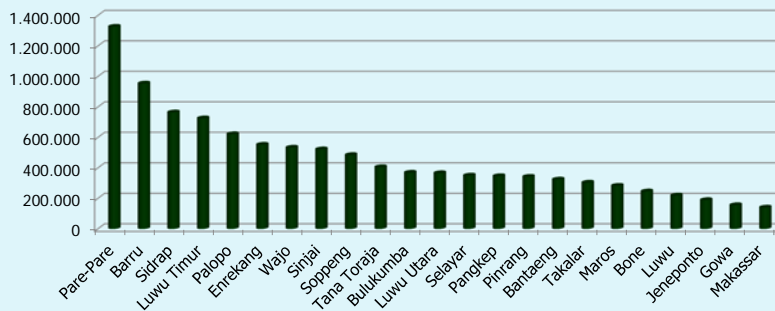
- ☑ Kabupaten Selayar terendah, rata-rata Rp 21.105.257 per PNS per tahun;
- ☑ Kabupaten Luwu Timur tertinggi, rata-rata Rp 49.738.321 per PNS per tahun.

Proporsi Belanja Modal Terhadap Total Belanja Daerah Menurut Kab./Kota, 2011



- ☑ Tahun 2011, secara rata-rata, proporsi belanja modal terhadap total belanja daerah kabupaten/kota sebesar 19,44%, menurun dibandingkan tahun 2005 (22,76%),
- ☑ Kabupaten Barru tertinggi, Kabupaten Selayar terendah.

Belanja Modal Per Kapita Menurut Kab./Kota, 2011

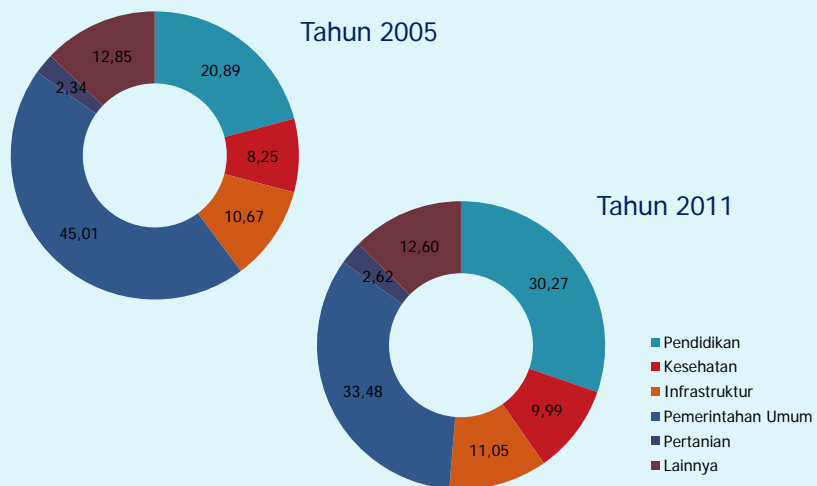


- ☑ Belanja modal per kapita terendah (di bawah Rp 200.000 per orang) adalah Kota Makassar, Kabupaten Gowa, Jeneponto.
- ☑ Kota Pare-Pare tertinggi, Kota Makassar terendah.

Matriks Indikator Belanja Daerah Menurut Kab./Kota

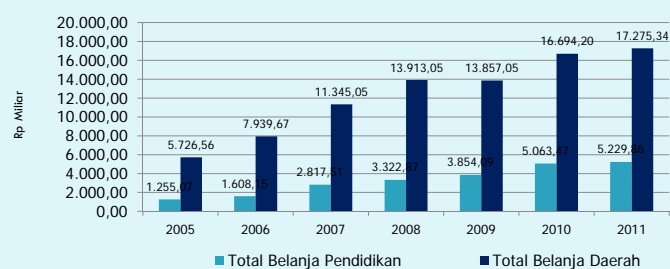
Total Belanja Daerah (5 Terendah)	Belanja Daerah Perkapita (5 Terendah)	Proporsi Belanja Pegawai (5 Tertinggi)	Peningkatan Belanja Pegawai (5 Tertinggi)	Belanja Pegawai Per PNS (5 Tertinggi)	Proporsi Belanja Modal (5 Terendah)	Belanja Modal Per Kapita (5 Terendah)
Bantaeng	Gowa	Jeneponto	Luwu Timur	Luwu Timur	Selayar	Makassar
Selayar	Bone	Bulukumba	Jeneponto	Makassar	Makassar	Gowa
Barru	Makassar	Gowa	Takalar	Takalar	Jeneponto	Jeneponto
Palopo	Jeneponto	Soppeng	Enrekang	Enrekang	Luwu	Luwu
Jeneponto	Luwu	Palopo	Luwu Utara	Palopo	Gowa	Bone

Proporsi Belanja Berdasarkan Sektor di Sulsel (Prov. + Kab./Kota)



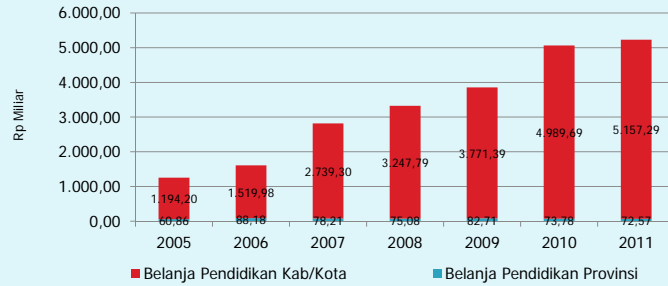
ANALISIS SEKTOR STRATEGIS: PENDIDIKAN

Total Belanja Daerah dan Belanja Sektor Pendidikan, 2005-2011



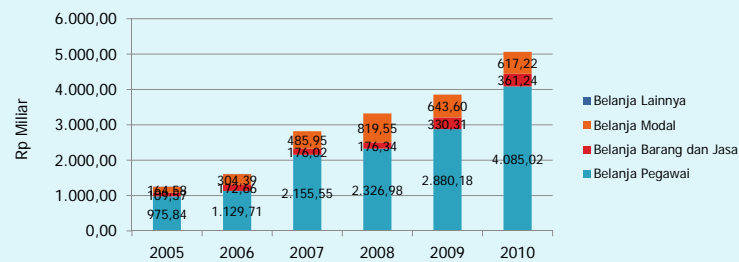
Proporsi belanja sektor pendidikan terhadap total belanja daerah di Sulsel sudah di atas 20 persen dengan kecenderungan yang semakin meningkat dari tahun ke tahun.

Total Belanja Pendidikan (Prov. + Kab./Kota) Sulsel



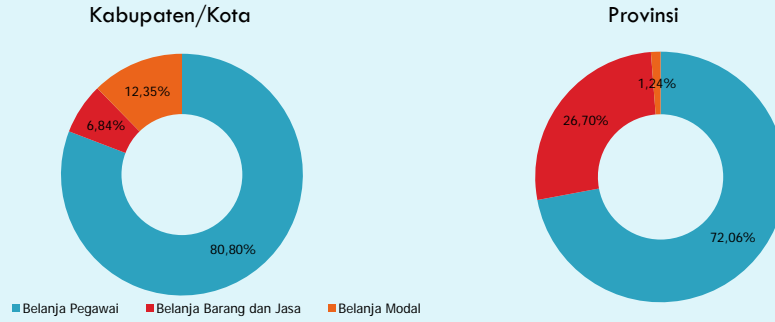
Belanja untuk sektor pendidikan di Sulsel meningkat empat kali lipat selama periode 2005-2011.

Komposisi Belanja Pendidikan Menurut Jenis Belanja



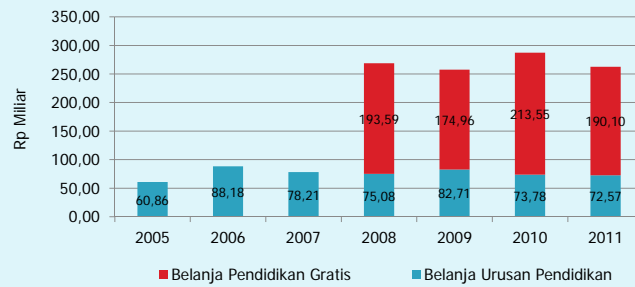
Porsi belanja pegawai relatif sangat besar, yaitu mencapai lebih dari 70 persen dari total belanja sektor pendidikan.

Perbandingan Komposisi Belanja Pendidikan Menurut Jenis Belanja Antara Provinsi dengan Kab./Kota



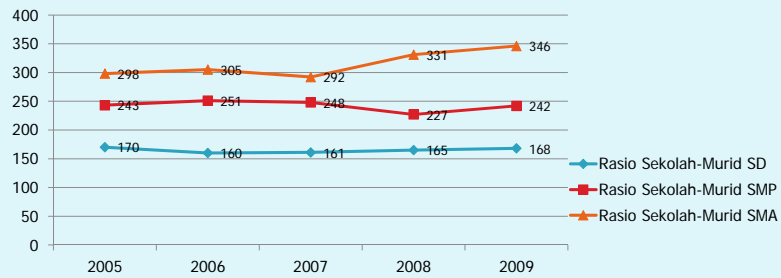
Proporsi belanja pegawai dan belanja modal untuk sektor pendidikan di kab./kota relatif lebih besar dibandingkan dengan di provinsi.

Belanja Urusan Pendidikan dan Pendidikan Gratis



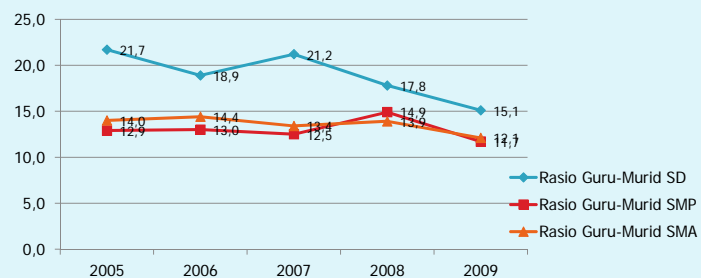
Anggaran yang dialokasikan untuk belanja pendidikan gratis hampir tiga kali lipat lebih besar dari belanja urusan pendidikan Pemerintah Sulsel.

Rasio Sekolah – Murid di Sulsel



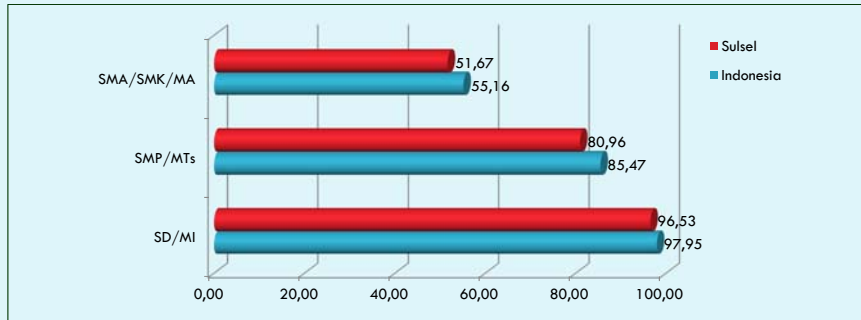
- Rasio sekolah-murid pada semua jenjang pendidikan relatif konstan selama periode 2005-2009.
- Semakin tinggi jenjang pendidikan, semakin besar rasio sekolah-murid.

Rasio Guru – Murid di Sulsel



- Rasio guru-murid pada semua jenjang pendidikan menunjukkan perbaikan selama periode 2005-2009.
- Semakin tinggi jenjang pendidikan, semakin kecil rasio guru-murid.

Angka Partisipasi Sekolah (APS), 2009



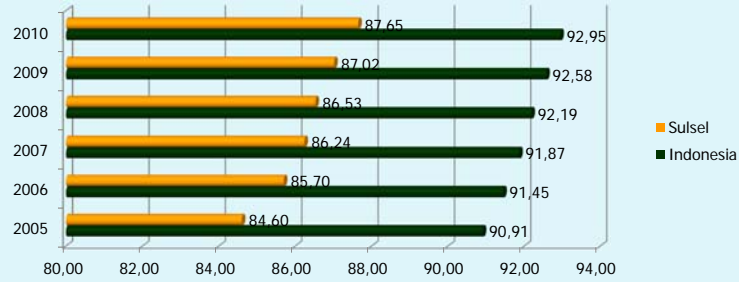
- ☑ APS Sulsele pada semua jenjang pendidikan masih berada di bawah Nasional;
- ☑ Kesenjangan yang cukup tajam antara APS Sulsele dan Nasional terjadi pada jenjang pendidikan SMP/MTs.

Angka Partisipasi Sekolah Menurut Gender

Tahun	7-12 tahun (SD/MI)		13-15 tahun (SMP/MTs)		16-18 tahun (SMA/SMK/MA)	
	Laki-Laki	Perempuan	Laki-Laki	Perempuan	Laki-Laki	Perempuan
2006	94.53	95.66	77.18	79.69	49.58	52.25
2007	94.79	95.75	77.12	79.74	49.65	53.06
2008	95.31	95.95	77.16	79.89	49.98	53.06
2009	95.93	97.19	79.86	82.04	51.30	51.94

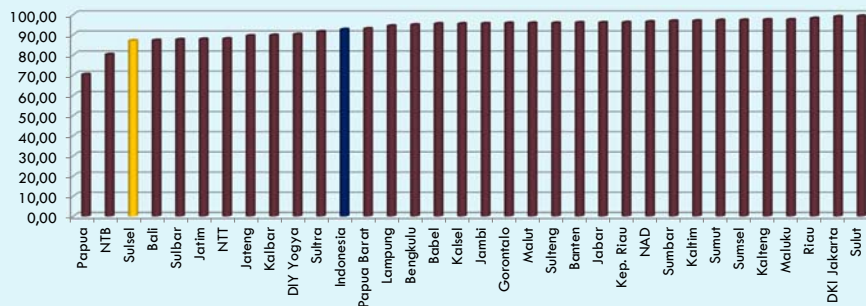
Perempuan memiliki tingkat APS yang relatif lebih tinggi dibandingkan dengan laki-laki pada semua jenjang pendidikan.

Angka Melek Huruf, 2010



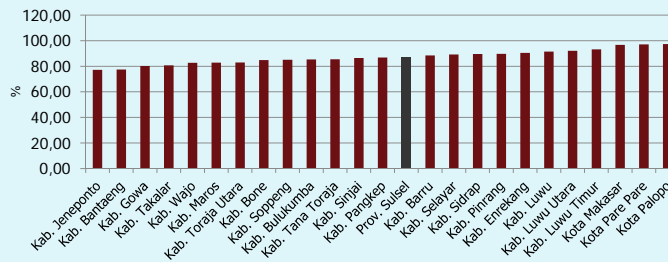
- Angka melek huruf Sulsel berada jauh di bawah angka Nasional;
- Angka ini telah menarik turun capaian IPM Sulsel;
- Capaian saat ini masih sangat jauh dari target RPJMD.

Angka Melek Huruf Menurut Provinsi, 2010



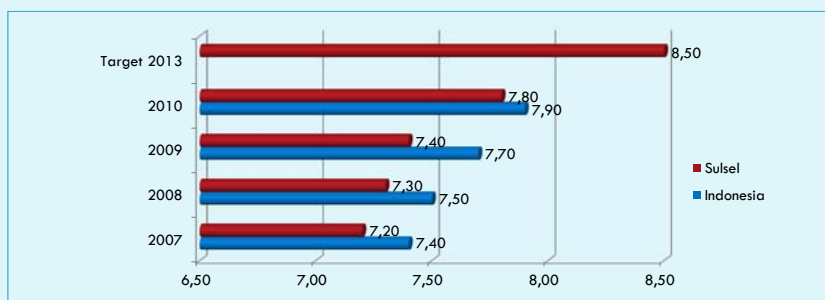
- Sulsel menempati posisi ketiga terbawah secara Nasional, setelah Papua dan NTB;

Angka Melek Huruf Menurut Kab./Kota, 2009



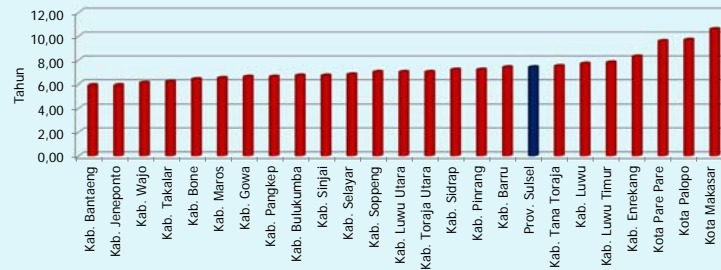
- ☑ Angka melek huruf terendah adalah Kab. Jeneponto, Bantaeng, dan Gowa;
- ☑ Angka melek huruf daerah "kota" relatif lebih tinggi dibandingkan dengan daerah "kabupaten".

Rata-Rata Lama Sekolah, 2007-2010



- ☑ Angka rata-rata lama sekolah Sulsel masih berada di bawah angka Nasional;
- ☑ Angka rata-rata lama sekolah Sulsel meningkat tajam pada tahun 2010;
- ☑ Capaian saat ini masih sangat jauh dari target RPJMD.

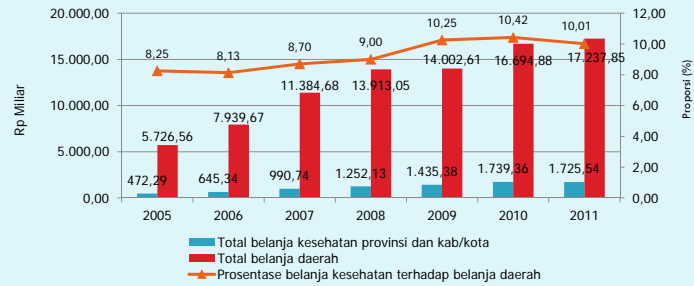
Rata-Rata Lama Sekolah Menurut Kab./Kota, 2009



- ☑ Rata-rata lama sekolah terendah adalah Kab. Bantaeng, Jeneponto, dan Gowa;
- ☑ Rata-rata lama sekolah daerah "kota" relatif lebih tinggi dibandingkan dengan daerah "kabupaten".

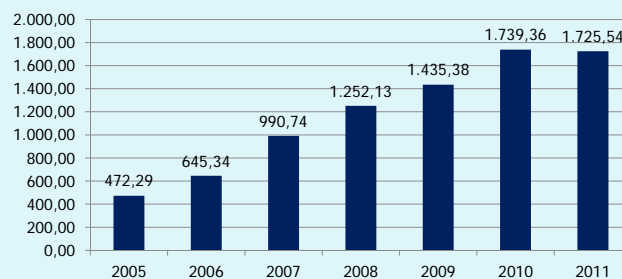
ANALISIS SEKTOR STRATEGIS: KESEHATAN

Total Belanja Daerah dan Belanja Sektor Kesehatan, 2005-2011



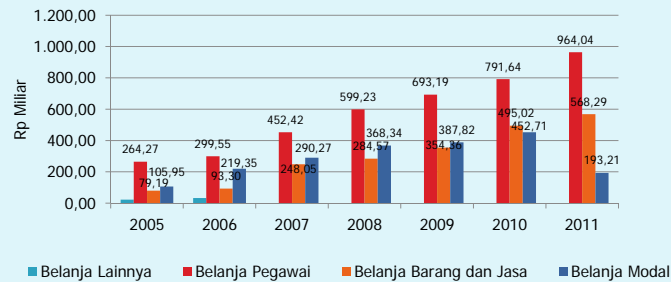
- ☑ Proporsi belanja sektor kesehatan terhadap total belanja daerah di Sulsel terus meningkat, meskipun cenderung fluktuatif;
- ☑ Tahun 2005, proporsi belanja kesehatan terhadap total belanja daerah sebesar 8,25 persen, dan meningkat menjadi 10,42 persen tahun 2010.

Perkembangan Total Belanja Kesehatan di Sulsel



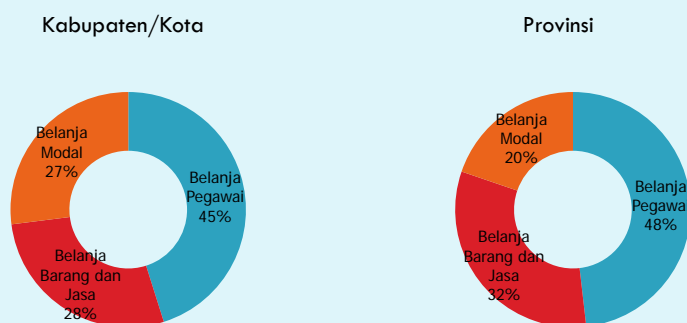
Total belanja kesehatan (provinsi dan kabupaten/kota) di Sulsel mengalami peningkatan sebesar empat kali lipat selama periode 2005-2011.

Komposisi Belanja Kesehatan Menurut Jenis Belanja



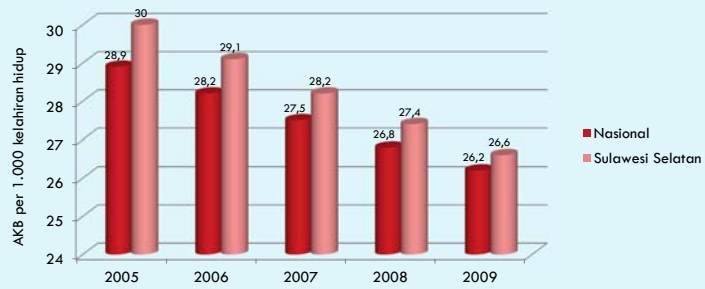
- Proporsi belanja pegawai di sektor kesehatan jauh lebih tinggi dibandingkan dengan proporsi belanja modal dan belanja barang dan jasa;
- Pada tahun 2011, proporsi belanja pegawai mencapai 53,87 persen, sedangkan proporsi belanja barang dan jasa dan belanja modal masing-masing 32,93 persen dan 17,88 persen

Perbandingan Komposisi Belanja Kesehatan Menurut Jenis Belanja Antara Provinsi dengan Kab./Kota, 2010



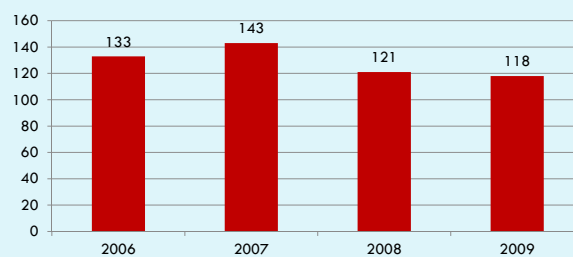
- Belanja pegawai mendominasi total belanja kesehatan, baik di provinsi maupun kabupaten/kota;
- Komposisi belanja sektor kesehatan relatif simetris antara provinsi dengan kabupaten/kota.

Angka Kematian Bayi, 2005-2009



- ☑ Saat ini, AKI Sulsel masih tinggi dari angka Nasional;
- ☑ AKI Sulsel menunjukkan penurunan secara konsisten;

Angka Kematian Ibu Melahirkan, 2005-2009



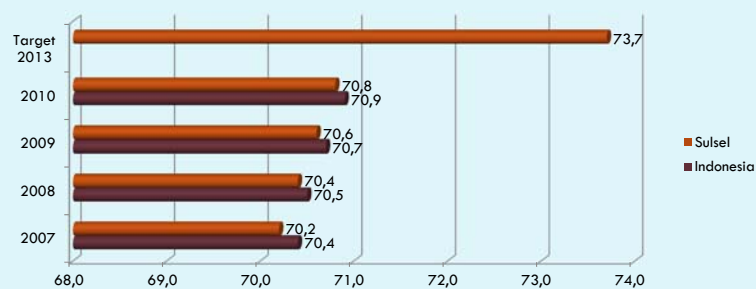
- ☑ Meski lambat, AKI Sulsel menunjukkan tren menurun;

Status Gizi Buruk, 2007-2009

Tahun	Bayi Berat Badan Lahir Rendah	Daerah dengan Kasus Tertinggi	Daerah dengan Kasus Terendah
2007	2.416 orang	Sidrap	Palopo
2008	1.998 orang	Makassar	Jeneponto
2009	2.040 orang	Makassar	Barro

- Kasus gizi buruk masih cukup tinggi di Sulsel.
- Daerah dengan kasus gizi buruk tertinggi adalah Kota Makasar.

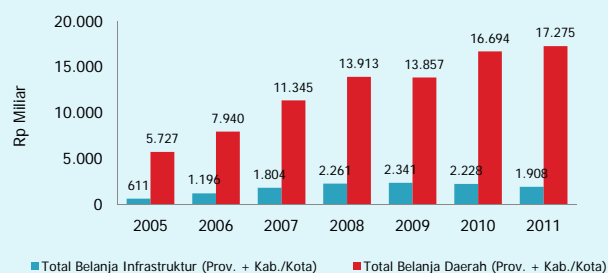
Angka Harapan Hidup, 2007-2010



- Saat ini, AHH Sulsel masih berada di bawah Nasional;
- AHH Sulsel semakin berhimpit dengan AHH Nasional;
- Capaian AHH Sulsel masih jauh dari target RPJMD.

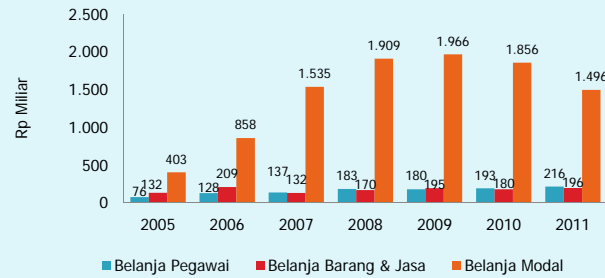
ANALISIS SEKTOR STRATEGIS: INFRASTRUKTUR

Total Belanja Daerah dan Belanja Sektor Infrastruktur, 2005-2011



- ☑ Belanja sektor infrastruktur (prov. + kab./kota) di Sulsel meningkat lebih dari tiga kali lipat selama periode 2005-2011.
- ☑ Proporsi belanja infrastruktur terhadap total belanja daerah menunjukkan kecenderungan yang semakin meningkat.

Komposisi Belanja Infrastruktur Menurut Jenis Belanja



- ☑ Belanja sektor infrastruktur didominasi oleh belanja modal. Tahun 2005, proporsi belanja modal terhadap total belanja infrastruktur mencapai 66,0% dan meningkat menjadi 78,41% pada tahun 2011.
- ☑ Proporsi belanja pegawai terhadap total belanja infrastruktur cenderung menurun.

Jumlah pesawat, penumpang, dan barang yang melalui Bandar Udara Sultan Hasanuddin, Makassar

	2005	2006	2007	2008	2009
Pesawat Datang (Unit)	21,214	22,441	24,247	24,533	24,425
Pesawat Berangkat (Unit)	21,080	22,419	24,257	24,536	24,448
Penumpang Datang (Orang)	1,389,117	1,421,248	1,514,914	1,579,822	1,781,443
Penumpang Berangkat (Orang)	1,323,435	1,509,649	1,646,318	1,751,558	1,865,029
Penumpang Transit (Orang)	931,501	1,076,823	1,299,969	1,320,518	1,268,287
Bongkar Bagasi (Ton)	16,667	19,030	20,085	20,685	21,932
Bongkar Kargo (Ton)	16,069	16,398	16,550	17,934	18,513
Muat Bagasi (Ton)	14,417	30,197	32,918	17,558	19,806
Muat Kargo (Ton)	14,952	25,684	26,313	14,435	13,586

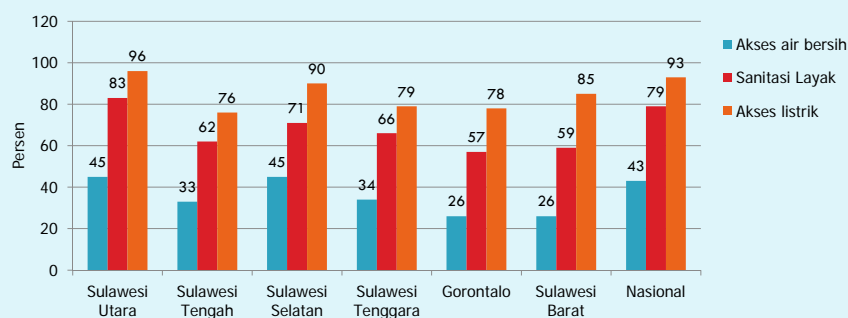
- ☑ Selama periode 2005-2009, penggunaan moda transportasi udara untuk pergerakan pesawat, manusia dan barang menunjukkan peningkatan.

Jumlah penumpang dan barang yang melalui Pelabuhan Laut Soekarno-Hatta, Makassar

	2005	2006	2007	2008	2009
Penumpang Naik (Orang)	426,462	418,434	409,667	552,041	510,869
Penumpang Turun (Orang)	348,048	324,399	359,359	384,438	365,174
Bongkar Dalam Negeri (Ton)	1,499,747	1,368,806	1,402,992	1,649,285	1,419,795
Muat Dalam Negeri (Ton)	1,269,857	1,310,291	1,146,982	910,601	637,155
Bongkar Luar Negeri (Ton)	669,460	784,901	820,858	724,301	828,451
Muat Luar Negeri (Ton)	855,350	885,750	688,947	446,593	288,607

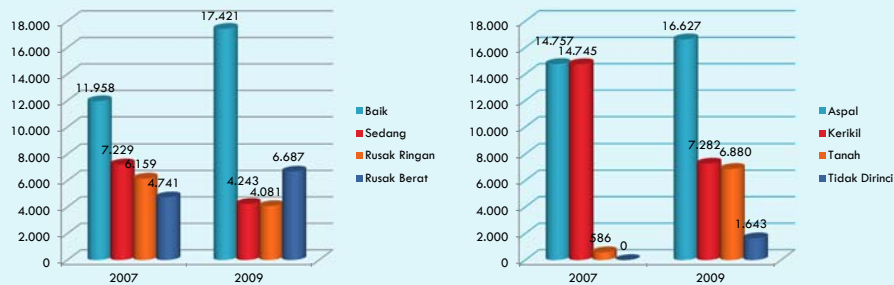
- Secara umum, selama periode 2005-2009, penggunaan moda transportasi laut meningkat untuk pergerakan penumpang, tetapi menurun untuk pergerakan barang.

Infrastruktur Dasar Pulau Sulawesi, 2009



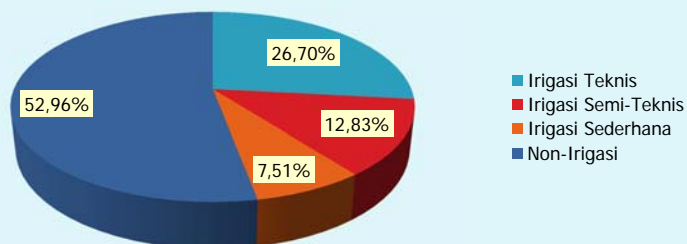
- Sulsel terbaik kedua di Pulau Sulawesi dalam hal infrastruktur dasar, sesudah Sulut;
- Dibandingkan dengan Nasional, Sulsel lebih baik dalam hal akses air bersih, tetapi buruk dalam hal sanitasi dan akses listrik.

Kondisi Infrastruktur Jalan di Sulsel, 2010



- ☑ Panjang jalan dengan kondisi baik meningkat, tetapi kondisi rusak berat juga meningkat;
- ☑ Panjang jalan dengan jenis permukaan aspal meningkat, tetapi jenis permukaan tanah juga meningkat;
- ☑ Proporsi jalan dengan kondisi rusak ringan dan berat mencapai sepertiga dari total panjang jalan.

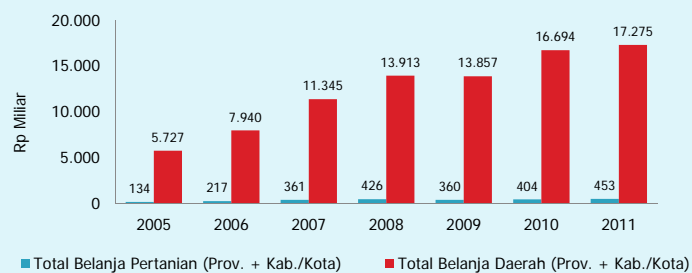
Jaringan Irigasi di Sulsel, 2010



- ☑ Lebih dari setengah luas lahan sawah di Sulsel sama sekali tidak memiliki jaringan irigasi (sawah tadah hujan);
- ☑ Dari total luas lahan sawah di Sulsel, hanya sekitar seperempat yang memiliki irigasi teknis.

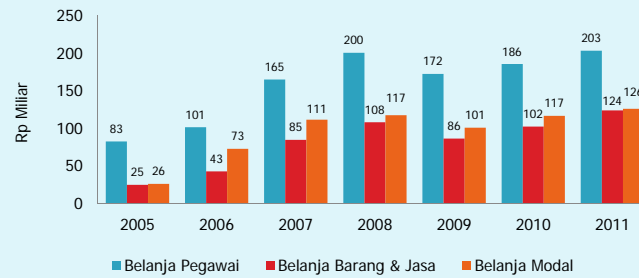
ANALISIS SEKTOR STRATEGIS: PERTANIAN

Total Belanja Daerah dan Belanja Sektor Pertanian, 2005-2011



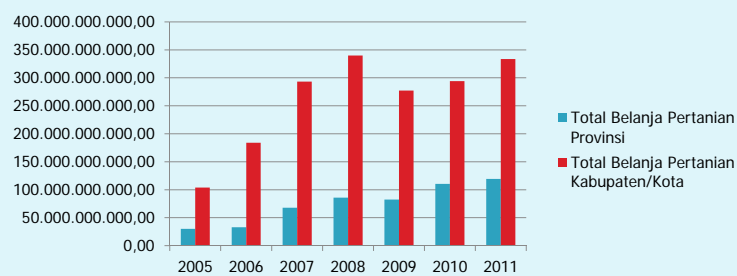
- Selama periode 2005-2011, belanja sektor pertanian (provinsi+ kab./ kota) di Sulsel meningkat hampir empat kali lipat.

Komposisi Belanja Sektor Pertanian Menurut Klasifikasi Ekonomi



- ☑ Komposisi belanja sektor pertanian menurut klasifikasi ekonomi didominasi oleh belanja pegawai, namun dengan kecenderungan yang semakin menurun.

Total Belanja Sektor Pertanian Provinsi dan Kab./Kota



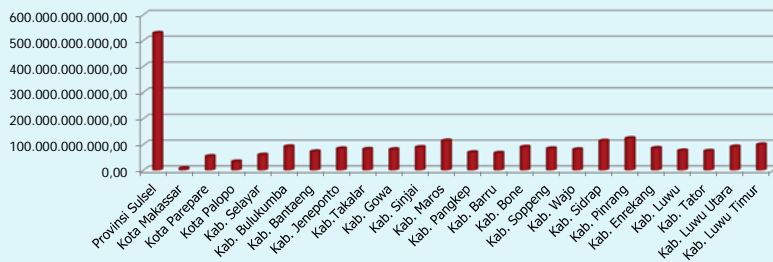
- ☑ Baik pada level provinsi maupun kab./kota, belanja sektor pertanian menunjukkan peningkatan tetapi cenderung fluktuatif.

Perbandingan Komposisi Belanja Pertanian Menurut Jenis Belanja Antara Provinsi dengan Kab./Kota



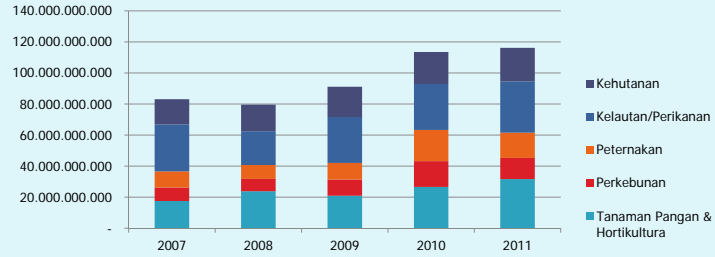
- Proporsi belanja pegawai di sektor pertanian relatif sama antara provinsi dan kab./kota.
- Proporsi belanja modal lebih tinggi di kab./kota, sedangkan proporsi belanja barang dan jasa lebih tinggi di provinsi.

Total Belanja Sektor Pertanian Menurut Kab./Kota



- Kab. Pinrang mengalokasikan anggaran untuk sektor pertanian paling besar, disusul Kab. Maros dan Sidrap.

Belanja Sektor Pertanian Menurut Subsektor



- Belanja sektor pertanian didominasi oleh belanja subsektor tanaman pangan dan hortikultura serta kelautan dan perikanan.

Total Produksi Komoditas Unggulan di Sulsel



- Volume produksi komoditas unggulan Sulsel bertumbuh sangat pesat dalam tiga tahun terakhir.



POTRET BELANJA PROVINSI SULAWESI SELATAN

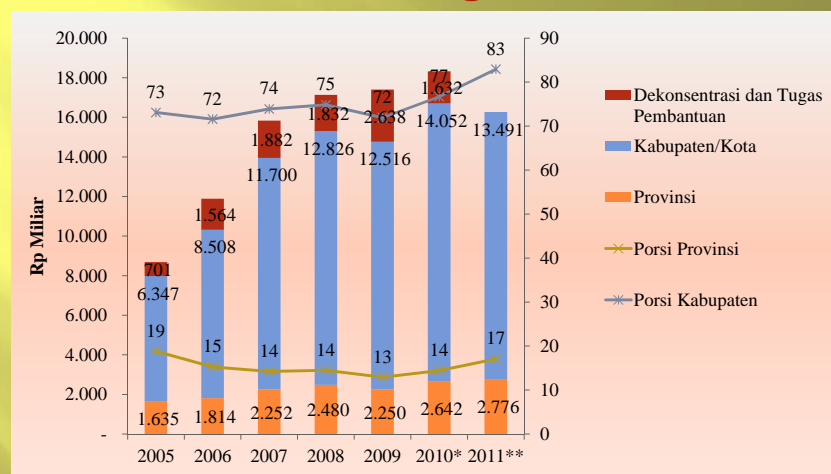
NURSINI
MAKASSAR
28 FEBRUARI 2012

OUTLINE

- ▣ Total Belanja Daerah di Sulawesi Selatan
- ▣ Belanja Klasifikasi Ekonomi
- ▣ Belanja menurut Sektor

GAMBARAN TOTAL BELANJA DAERAH

TOTAL BELANJA DAERAH



Total belanja daerah Sulawesi Selatan meningkat lebih dari dua kali lipat 8.683 miliar pada tahun 2005 meningkat cukup signifikan menjadi Rp 18.327 miliar tahun 2010. Namun pertumbuhannya cukup berfluktuasi selama periode 2005-2010 yang secara rata-rata mencapai 17,04 persen per tahun

Gambaran Belanja Provinsi

- ▣ Meningkat setiap tahun kecuali pada tahun 2009.



- Penurunan sektor pemerintahan umum (belanja tidak terduga sekitar 84,63 persen,)
 - Penurunan infrastruktur (belanja modal sebesar Rp 94 miliar)
 - penurunan Kesehatan (belanja pegawai sebesar Rp 11 miliar).
- ▣ Porsi belanja yang dikelola oleh pemerintah provinsi rata-rata 15 persen pertahun (2005-2010)

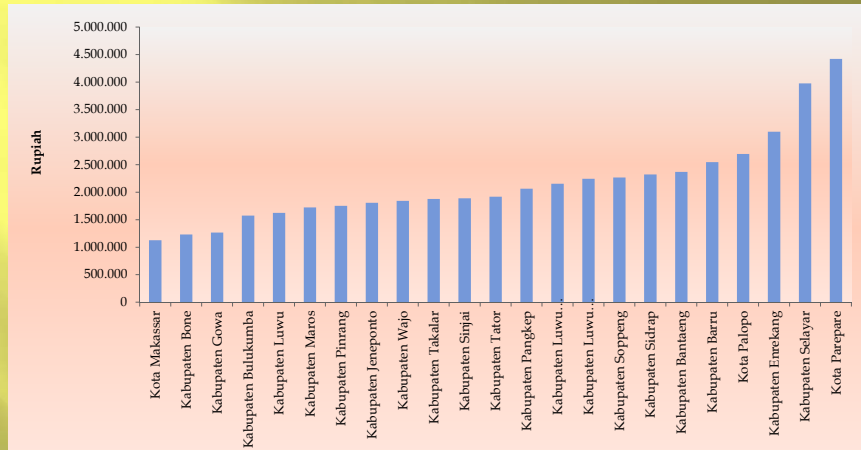
Gambaran Belanja Kabupaten/Kota

- ▣ Total belanja pemerintah kabupaten/kota dengan rata-rata bertumbuh 18,23 persen pertahun



- Peningkatan belanja pegawai dengan rata-rata Rp 5.281 miliar
 - Belanja modal rata-rata Rp 2.080 miliar
- ▣ Porsi belanja daerah yang dikelola oleh pemerintah kabupaten/kota rata-rata 74 persen pertahun

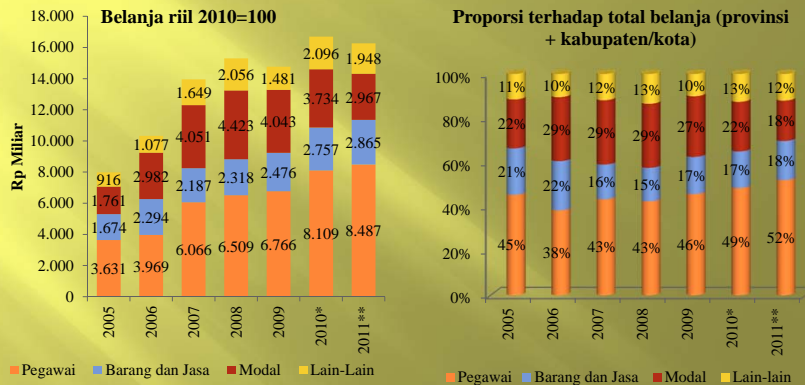
Belanja Riil Per Kapita Kabupaten/Kota, 2010



Pendapatan perkapita diatas dari 3 juta rupiah :Kota Pare-Pare (Rp 4.421.556),
Kabupaten Selayar (Rp 3.978.295) dan Kabupaten Enrekang (Rp 3.099.597).

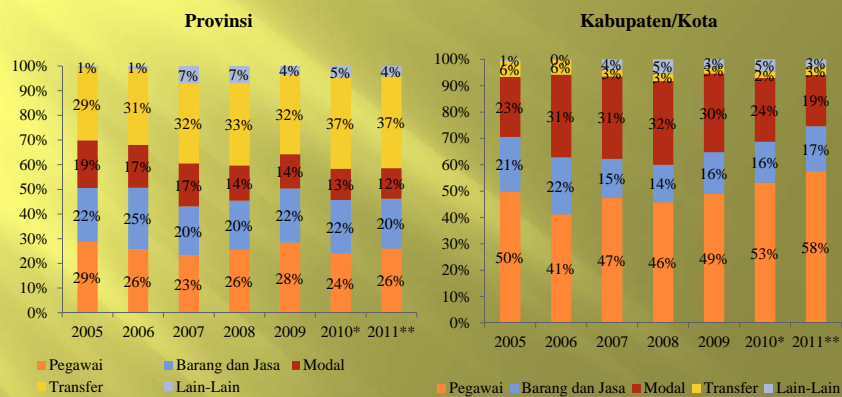
BELANJA KLASIFIKASI EKONOMI

KLASIFIKASI BELANJA DAERAH



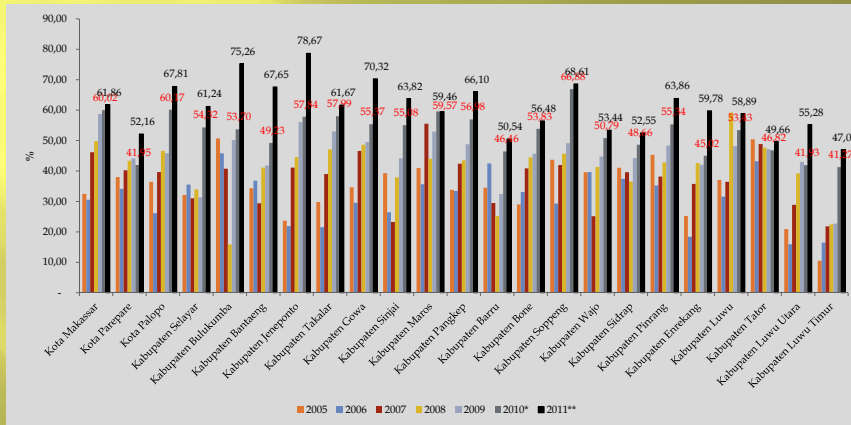
Penyumbang terbesar belanja pegawai rata-rata 44%
 Belanja Modal rata-rata 26,44 persen,
 Belanja barang dan jasa sebesar 18 persen dan belanja lainnya (bantuan sosial, bantuan keuangan/daerah bawahan, bunga, subsidi, belanja tidak terduga) sebesar 12 persen.

PROVINSI DAN KABUPATEN/KOTA

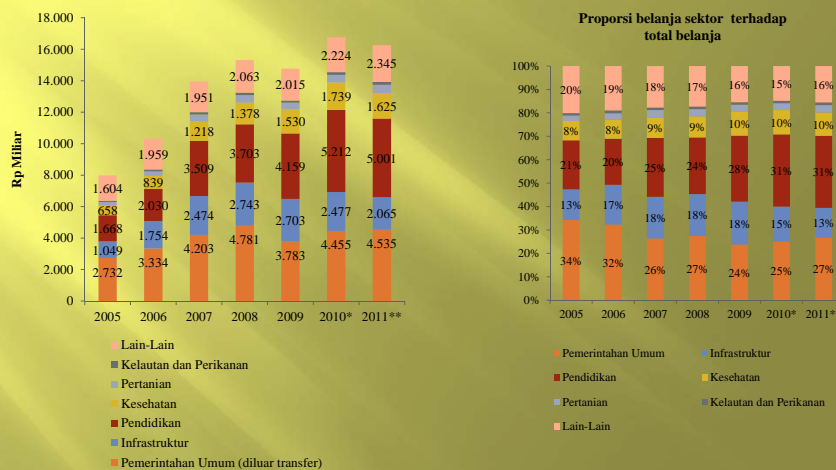


1. Belanja pegawai rata-rata 26 persen setiap tahun dan cenderung menurun
1. Belanja pegawai rata-rata 48 persen per tahun,
2. Belanja modal rata-rata 29 persen per tahun.

PORSI BELANJA PEGAWAI TERHADAP TOTAL BELANJA KABUPATEN/KOTA



BELANJA SEKTORAL



ALOKASI BELANJA PROVINSI SEKTOR TERPILIH

Provinsi	2005		2006		2007		2008		2009		2010*		2011**	
	Rp M	%	Rp M	%	Rp M	%	Rp M	%	Rp M	%	Rp M	%	Rp M	%
pemerintahan Umum (diluar transfer)	414	25	457	25	478	21	496	20	467	21	613	23	606	22
Transfer (bagi hasil dan bantuan keuangan)	479	29	559	31	884	39	995	40	804	36	1,000	38	1,052	38
Infrastruktur	174	11	188	10	257	11	406	16	298	13	342	13	416	15
Pendidikan	83	5	116	6	117	5	104	4	108	5	110	4	108	4
Kesehatan	150	9	152	8	167	7	223	9	214	10	232	9	239	9
Pertanian	42	3	43	2	83	4	95	4	100	4	123	5	125	5
Kelautan dan Perikanan	14	8	16	1	24	1	24	1	32	1	30	1	31	1
Lain-Lain	278	17	283	16	242	11	138	6	228	10	192	7	198	7
Total	1,635	100	1,814	100	2,252	100	2,480	100	2,250	100	2,642	100	2,776	100

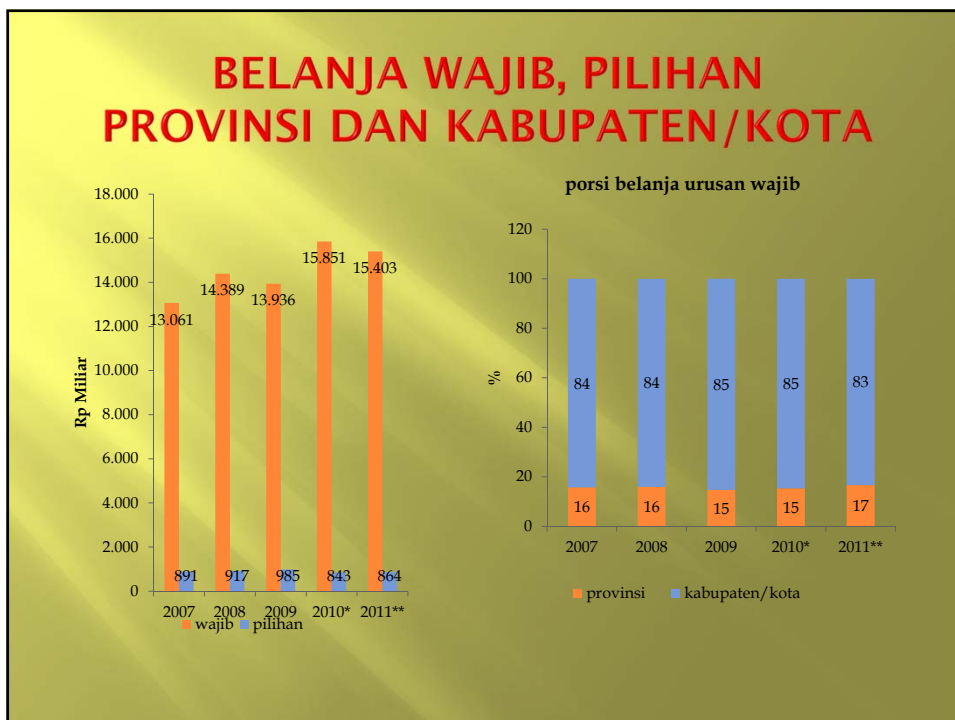
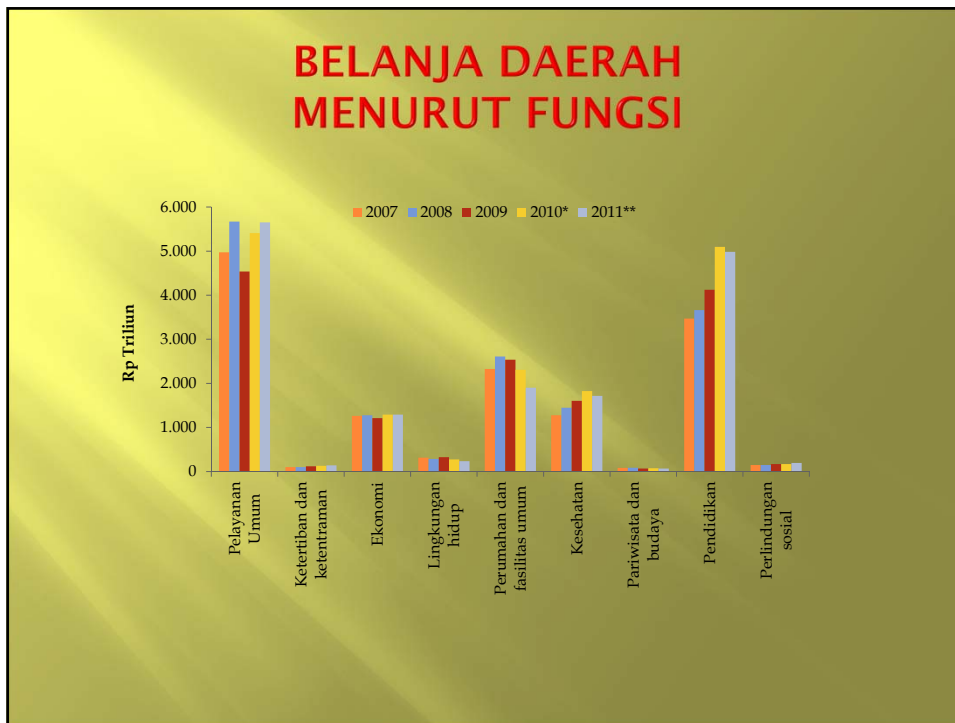
Porsi alokasi belanja terbesar adalah sektor pemerintahan umum, infrastruktur, kesehatan dan pendidikan.

ALOKASI BELANJA KABUPATEN/KOTA SEKTOR TERPILIH

Kabupaten/Kota	2005		2006		2007		2008		2009		2010*		2011**	
	Rp M	%	Rp M	%	Rp M	%	Rp M	%	Rp M	%	Rp M	%	Rp M	%
Pemerintahan Umum (diluar transfer)	2,318	37	2,877	34	3,570	31	4,119	32	3,238	26	3,814	27	3,908	29
Transfer (bagi hasil dan bantuan keuangan)	381	6	475	6	317	3	368	3	319	3	330	2	424	3
Infrastruktur	875	14	1,565	18	2,216	19	2,337	18	2,405	19	2,134	15	1,649	12
Pendidikan	1,585	25	1,913	22	3,392	29	3,599	28	4,052	32	5,028	36	4,893	36
Kesehatan	508	8	687	8	1,052	9	1,155	9	1,315	11	1,507	11	1,386	10
Pertanian	145	2	239	3	361	3	379	3	329	3	369	3	386	3
Kelautan dan Perikanan	69	1	109	1	129	1	142	1	115	1	139	1	153	1
Lain-Lain	466	7	642	8	662	6	728	6	744	6	730	5	692	5
	6,347	100	8,508	100	11,700	100	12,826	100	12,516	100	14,052	100	13,491	100

-rata-rata porsi alokasi belanja pendidikan terhadap total belanja kab/kota 33 persen per tahun

-pengembangan infrastruktur terhadap total belanja kabupaten/kota rata-rata mencapai 17 persen per tahun



KESIMPULAN

- ▣ Belanja pemerintah daerah di Sulawesi Selatan meningkat dengan tingkat pertumbuhan rata-rata 17,4 persen pertahun periode 2005-2010
 - Provinsi secara rata-rata 10 persen,
 - Kabupaten/kota rata-rata 18,23 persen
- ▣ Porsi Belanja pegawai mencapai rata-rata 44 persen per tahun
 - Provinsi 26 persen,
 - Kabupaten 48 persen
- ▣ Porsi belanja menurut sektor, didominasi oleh pemerintahan umum tapi cenderung menurun dan sektor pendidikan yang cenderung meningkat